

2018 IIA INDONESIA NATIONAL CONFERENCE

Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times

National Budget in Disruptive Times: Opportunities and Challenges

Sumiyati, Inspector General of Ministry of Finance



Sumiyati, Ak., M.F.M



Inspector General of Ministry of Finance Republic of Indonesia

Lahir di Sragen, 6 Juli 1961

Pendidikan terakhir S2 di Central Queensland University majoring in Financial Management

Jabatan sekarang:

- 1. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah*
- 2. Dewan Komisaris PT BTN Tbk*
- 3. Dewan Pengawas BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran*



NATIONAL BUDGET IN DISRUPTIVE TIMES: OPPORTUNITY AND CHALLENGES

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Bali, 29 Agustus 2018



DIGITAL DISRUPTION PROBLEM

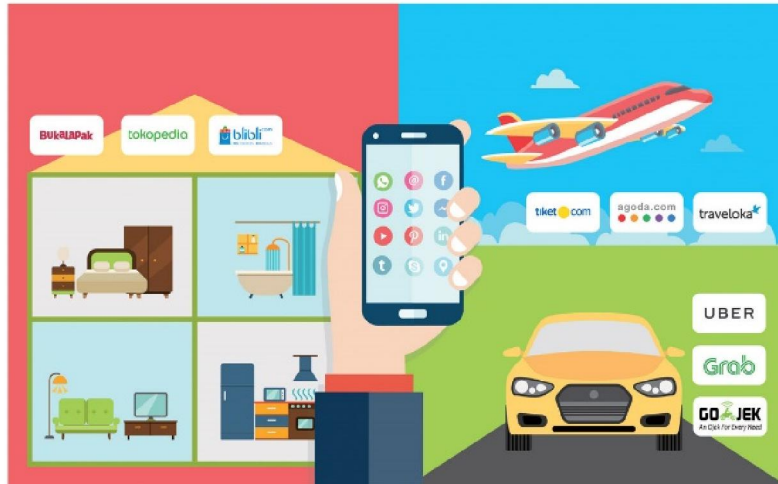
Leaders know they have a problem with digital disruption — and know they must react to that problem — but they have little guidance to determine the right course of action.



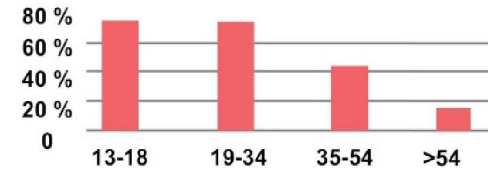
SOME **FACTS** ON THE **INDONESIA** DIGITAL **ECONOMY**



Digital Disruption Benefit & Influence



Penetrasi Internet Berdasar Usia



Penetrasi Internet
54,68%
143,26 Juta
dari 262 Juta

Jumlah Smartphone
74,9 Juta
Terbesar ketiga di Asia Pasifik,
setelah China dan India

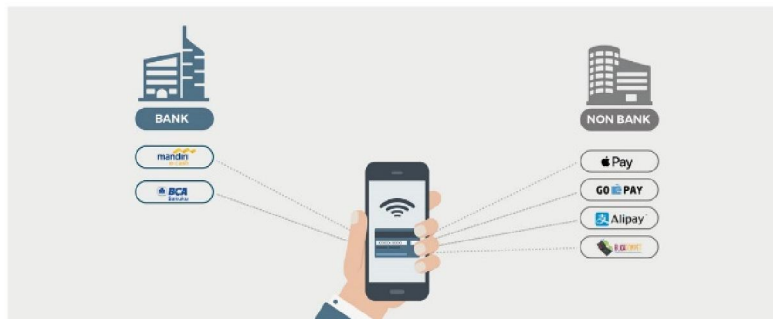
Pengguna Gawai
96,51%
Dari seluruh
pengguna Internet

Pertumbuhan akses internet tertinggi di Asia Pasifik

akan tetapi

ICT Development Index 2017
111 dari 176

Singapura 18, Brunei 53, Thailand 78



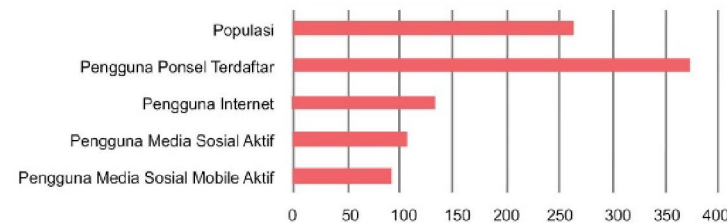
Variasi Interaksi Pembayaran



Fintech Opportunities

CHEAP | FAST | ANYWHERE | ANYTIME | ANY DEVICE

Pengguna Ponsel dan Penetrasi Media Sosial (Januari 2017)



Sumber: KataData (2017)

Disruption, Great Shifting and Digital Economy

Promising development of internet penetration: (i) about 56,64% in 2017, with the highest growth in Asia- Pacific, (ii) the majority of internet users is less than 34 years of age, and (iii) around 90% of the internet users accessing internet through mobile devices

Great shifting of the economy and culture: traditional to e-commerce, human labor to machine, consumption to recreation, cities to rural (Khasali, 2018)

Digital economy could boost the economics output around \pm \$150 billion or \pm 10% of GDP each year, from: (i) operation optimization, (ii) human health and human productivity improvement, dan (iii) product development and sales improvement (McKinsey, 2017)

Yet, the final impact is inconclusive but the economy is expected to grow above 5% each year



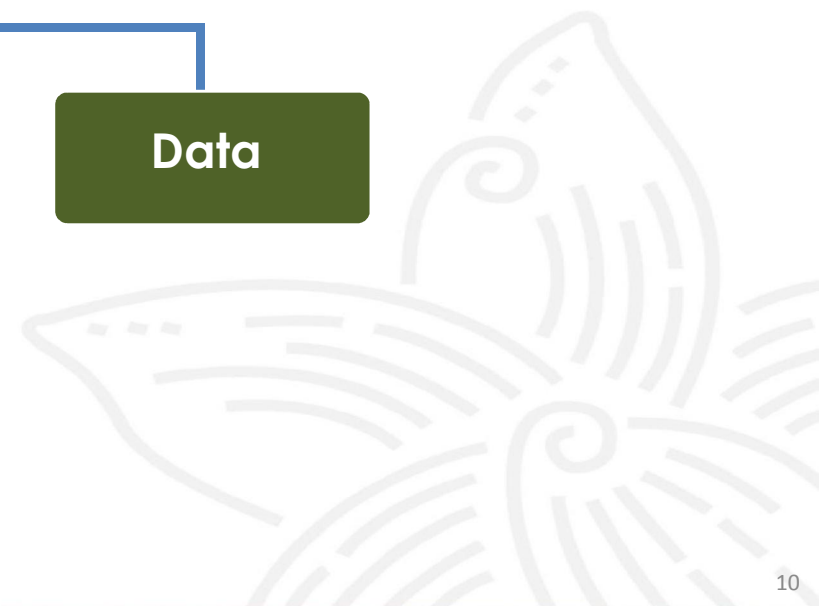
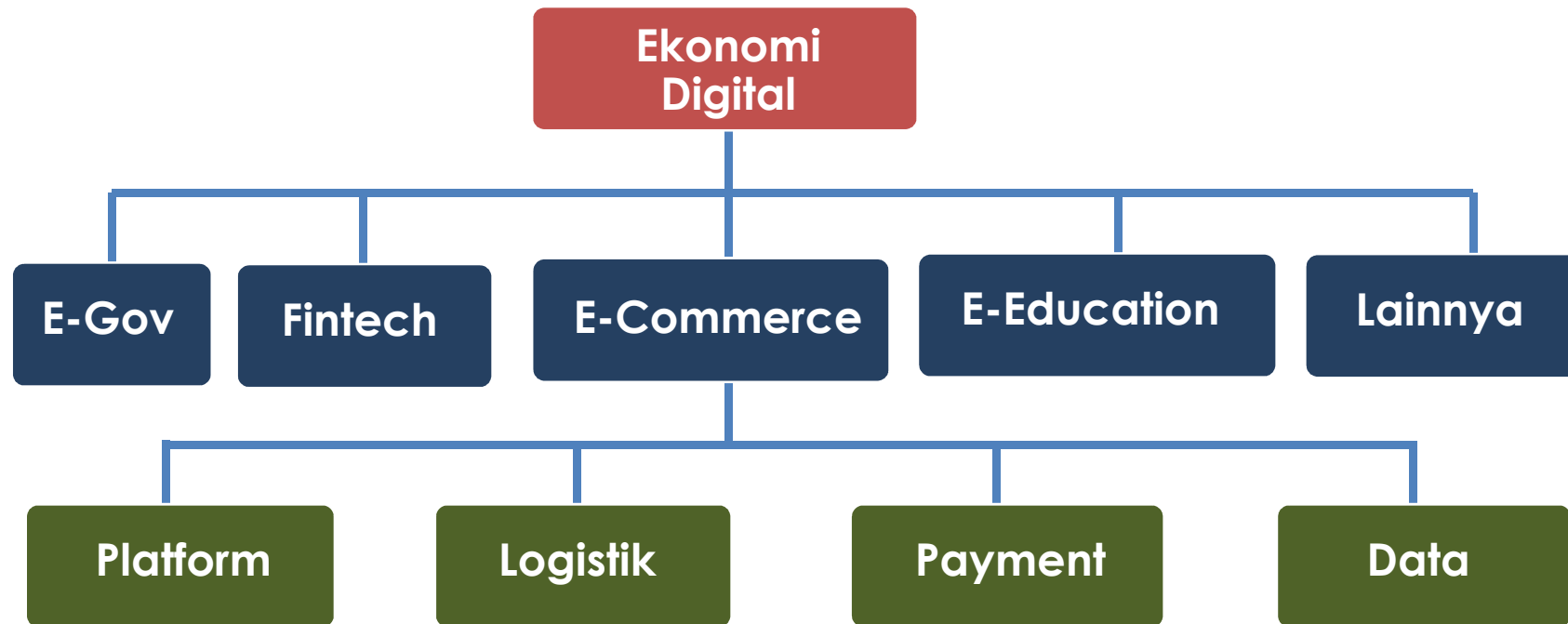
Outline **POTENSI EKONOMI DIGITAL**

**APBN DALAM MENJAWAB
TANTANGAN EKONOMI DIGITAL**

**PRINSIP DAN TANTANGAN
PEMAJAKAN EKONOMI DIGITAL**



POTENSI EKONOMI DIGITAL





“E-Commerce di Amerika Serikat pada tahun 2000 memberikan efek signifikan pada sektor ekonomi seperti komunikasi, keuangan, dan retail yang menyumbang 15% dari GDP secara umum.” ~ (Huang & Vanichviroon, 2008)

“Percepatan dan pertumbuhan produktivitas terjadi karena teknologi informasi dan internet.”

~ (United Nations Conference on Trade and Development / UNCTAD, 2001)

“E-Commerce dapat menekan laju inflasi melalui kompetisi yang lebih besar, penghematan biaya, dan perubahan perilaku penetapan harga oleh penjual.”

~ (El Gawady, 2005)

“E-Commerce dapat mengurangi biaya penyediaan jasa dan biaya transaksi, serta membuat konsumen dapat menemukan harga paling kompetitif dari barang atau jasa.” ~ (Das Gupta, 2014)



FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Proyeksi transaksi di Indonesia 2016

US\$ **14,5** miliar
(Rp 190 triliun)

Nominal transaksi per populasi 2014

US\$ **56,98**
(Rp 747 ribu)

Para pemain



ON DEMAND SERVICES

Pangsa pasar Indonesia tinggi

132,7 juta | **63,4** juta

Pengguna internet | Pengguna ponsel pintar

Para pemain



E-COMMERCE

Potensi transaksi di Indonesia

2013

US\$ **8** miliar
(Rp 104 triliun)

2016

US\$ **20** miliar
(Rp 261 triliun)

2020

US\$ **130** miliar
(Rp 1.700 triliun)

Para pemain



INTERNET OF THINGS (IOT)

Potensi pasar Asia Pasifik

2015 US\$ **250** miliar

2020 US\$ **583** miliar

Para pemain



POTENSI EKONOMI DIGITAL INDONESIA

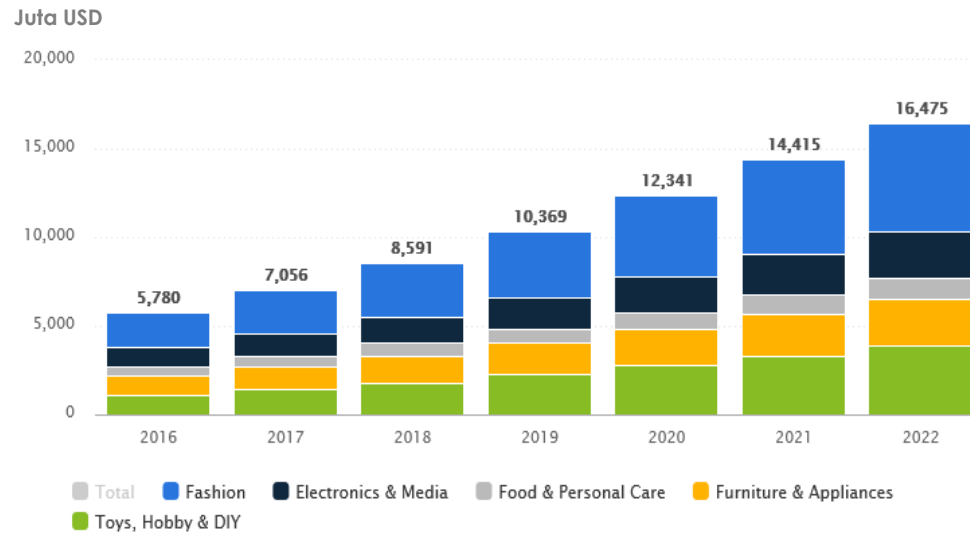
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020. Salah satunya melalui penerbitan *roadmap* e-commerce.



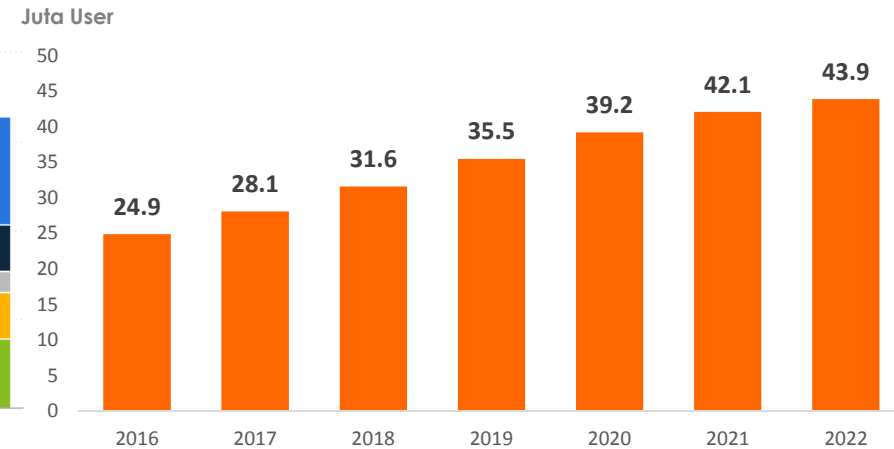
Potensi E-Commerce di Indonesia



E-commerce revenue & outlook



E-commerce User & outlook



Source: Statista

- Sampai Januari 2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta dengan 48% diantaranya pengguna internet harian. (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII).
- Tahun 2016, jumlah pembeli e-commerce di Indonesia mencapai 24,74 juta orang (9% dari total populasi), dengan total nilai transaksi USD 5,6 miliar. (Asosiasi E-commerce Indonesia/idEA)
- Jumlah pertumbuhan pelanggan e-commerce di Indonesia adalah tertinggi di dunia, dengan pertumbuhan 155% di Januari 2017. (We Are Social & Hootsuite Report)



Potensi E-Commerce di Indonesia



“Bukalapak **naik tiga digit** atau triple digit. Satu bulan transaksi di Bukalapak mencapai Rp 1 T, dengan transaksi per hari rata-rata 150.000. So far masih terus mengalami peningkatan terus sebagaimana jumlah pelapak yang saat ini sudah 1,7 juta,”

~ CEO Bukalapak Achmad Zaky

Bukalapak

“Pertumbuhan jumlah pengiriman JNE mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun lalu konsisten mencapai 30%. Saat ini jumlah pengiriman paket **setiap bulannya rata-rata 16 juta paket**. Sekitar 60%-70% pengiriman JNE adalah pengiriman e-Commerce dari online marketplace”

~ CEO JNE Mohammad Feriadi



“Traffic BLANJA.com **naik hampir 500%** dibandingkan 2016 dengan kontribusi terbanyak dari produk Fashion dan disusul oleh produk Health & Beauty. Sementara **produk UKM tumbuh hampir 40%** dan diharapkan masih akan terus meningkat”

~ CEO BLANJA.com Aulia E. Marinto

BLANJA
.com

“Saat ini di Tokopedia terdapat **jutaan merchants** yang menghasilkan lebih dari **Rp 1 T per bulan** lewat lebih dari **40 juta produk siap dibeli** dengan harga terbaik dan transparan.”

~ Comms Lead Tokopedia, Siti Fauziah

tokopedia

Apabila dari nilai transaksi 1 triliun rupiah sebulan, yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak diasumsikan hanya 1% nya saja, potensi penerimaan PPN adalah 1 miliar rupiah sebulan untuk satu marketplace.

Challenges

Defining a digital strategy is easier parts, strategy execution is the real challenges:

- economic owning vs. economic sharing
- IT security
- managing collaborative works:
- transformation is not only digital adoption
- culture change
- human resources problem
- political issues



Example: Overcoming the Three “S” Shortfalls (scale, speed, sustainability) Harnessing the output of 20% of Budget for Education Expenditures

- Target Outcome : Enhancing the quality of labor force anticipating the digital disruption
- Target Output : Number of Trained Students with android based programming
- Strategy : Digitalization specific mobile apps programming courses for SMK Students, in which some skillfull android programmer trainers gives coaching through internet and mobile apps (live streaming, interactives-webinars, recorded youtube video).

	SCALE	SPEED	SUSTAINABILITY
Current Condition	Massive: If based on number of SMKs, these activities need thousands of skilfull mobile apps programming trainers	Very late: difficult to find and mobilize numerous skillfull trainners across Indonesia	Low Sustainability: very expensive and difficult to mobilize skillfull trainners across Indonesia
Expected Condition	Massive: thousands of students from thousands of SMKs could learn together through interactive webinar, live streaming or recorded youtube videos, even through mobile apps	Very quick: within current SMK's infrstructures, it is much easier to prepare but still it must have legitimacy, support and operational competency to execute the activities	High sustainability: much cheaper and quick to prepare, but could better enhancing student experiences toward mobile apps programming

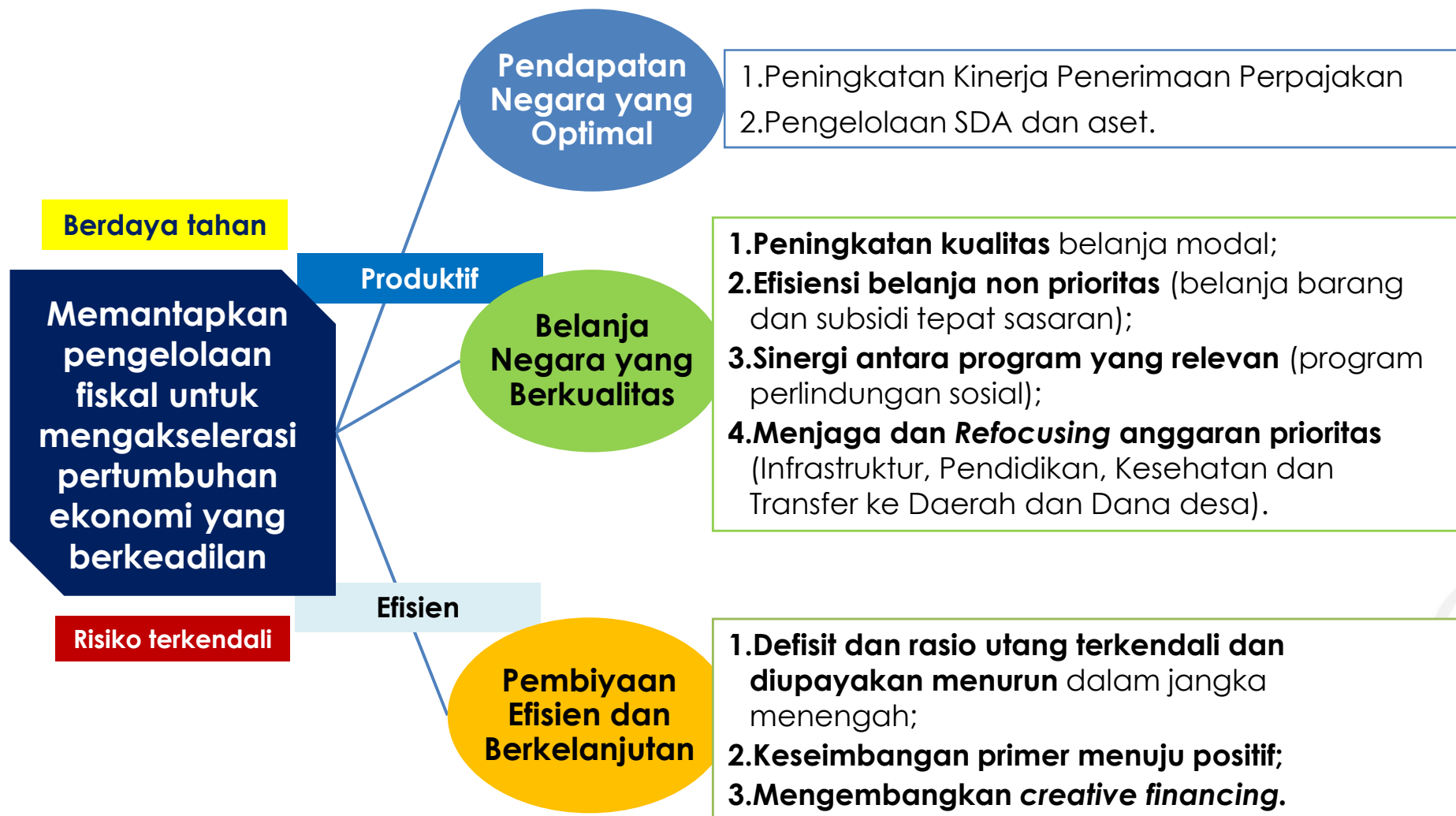


APBN DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI DIGITAL



ARAH DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH







KEBIJAKAN STRATEGIS

mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan



Mitigasi risiko Fiskal

- SAL (fiscal buffer);
- Dana cadangan risiko fiskal;
- Payung hukum (pasal krisis);
- BSF.

Perbaiki kualitas Pelayanan Publik

- Kesejahteraan aparatur negara & pensiunan;
- Kenaikan uang lauk pauk (Rp55 rb → Rp60 rb);
- Pemantapan reformasi brokrasi

Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan: Rp283,8T

- PKH; 10 juta KPM (Rp17,1T);
- BidikMisi; 401,7 ribu Mhs (Rp4,1T)
- JKN : 92,4 jt jiwa (Rp25,5T)
- PIP: 19,6 jt siswa (Rp11T)
- Subsidi & bantuan pangan: 15,6 juta KPM (Rp20,8T)
- Dana desa: 74.958 desa (Rp60T)

Kesehatan berkualitas: Rp111,0T

- PBI (JKN): 92,4 juta jiwa
- Sarana Faskes: 49 RS/Balikes
- Imunisasi anak (0-11 th): 92,5%



Optimalisasi pendapatan

- Peningkatan *tax ratio* (perluasan basis pajak, pengalihan potensi dan kepatuhan pajak);
- Perbaiki pengelolaan asset negara;

Ekspansif terarah & terukur

- Defisit terkendali (2,19% PDB);
- Rasio utang terkendali dibawah 30% PDB;
- Ekspansif untuk mendukung target pembangunan

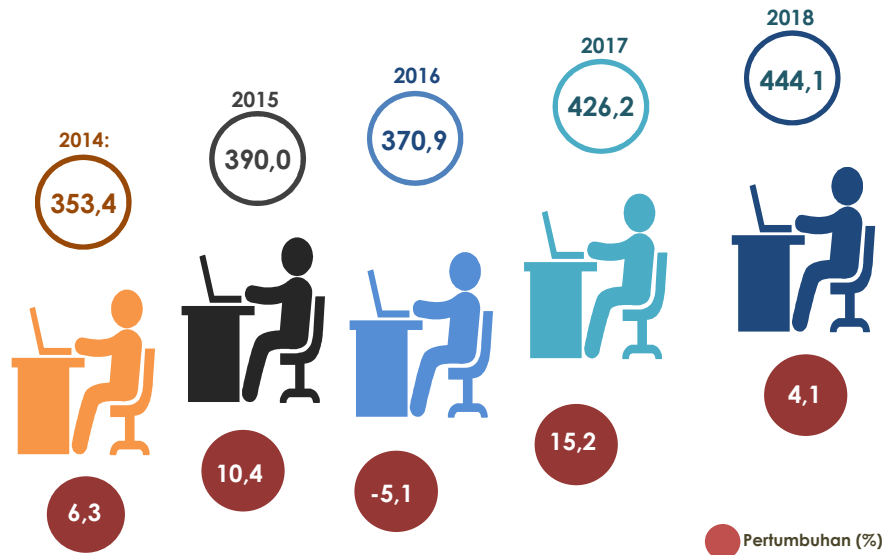
Konsisten Infrastruktur: Rp410,4T

- Jalan: 832 km
- Jalur KA: 639 km'sp
- Bandara baru 8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
- Irigasi: 781 km
- Rasio elektrifikasi: 95,15%;
- Rumah Susun 13.405 unit

Pendidikan berkualitas: Rp444,1T

- PIP: 19,6 juta siswa
- BOS: 262,2 ribu sekolah
- Rehab sekolah: 58,3 ribu

Pemerataan akses & kualitas pendidikan, penguatan vokasional, serta penguatan SWF pendidikan.

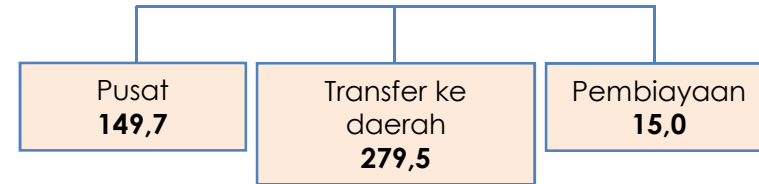


Arah kebijakan

1. Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
2. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.
3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.
4. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*).
5. Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*.
6. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Alokasi 2018 (triliun rupiah)

444,1



Sasaran Target (sementara)

Program Indonesia Pintar	19,6 juta jiwa	
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	56 juta jiwa	
Beasiswa Bidik Misi	401,7 ribu mahasiswa	
Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas	58,3 ribu	
Tunjangan Profesi Guru		
• PNSD	425 ribu guru	
• Non PNS	257,2 ribu guru	
• PNS	1,2 juta guru	

Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)	89,7%	Angka Partisipasi Murni (APM)	65,3%
Pendidikan Menengah	88,1%	Pendidikan Menengah	63,4%

● 2017 ● 2018



**Mendorong
Efektifitas Anggaran
Pendidikan Untuk
Peningkatan Akses,
Pemerataan Dan
Kualitas**

- **Insentif fiskal:
pembebasan bea masuk,
PPN dan PPh.**
- **Belanja K/L
(Kemendikbud,
Kemenristek Dikti,
Kemenag).**
- **Program (PKH, PIP, Bidik
Misi, BOS, BO PTN).**
- **Transfer kedaerah dan
Dana Desa (al. DAU, DAK
Fisik, TPG, Tamsil, BOS, BOP
PAUD).**
- **Penguatan LPDP sebagai
SWF pengelola *Endowment
fund* (DPPN).**

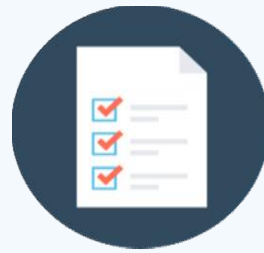


DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN E-COMMERCE

Paket Kebijakan XIV pada November 2016



**Dukungan
Pembiayaan**



Tax Relaxation



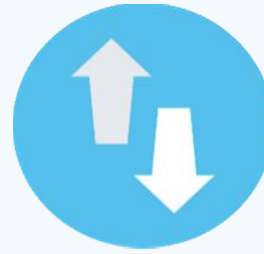
**Pengembangan
Kapasitas SDM**



**Perlindungan
Konsumen**



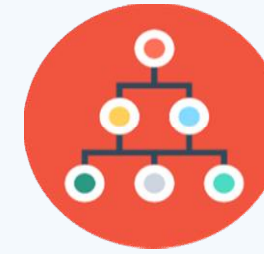
**Dukungan
Logistik**



**Infrastruktur
Telekomunikasi**



Cyber Security



**Dukungan
Manajemen**

1000
Technopreneurs

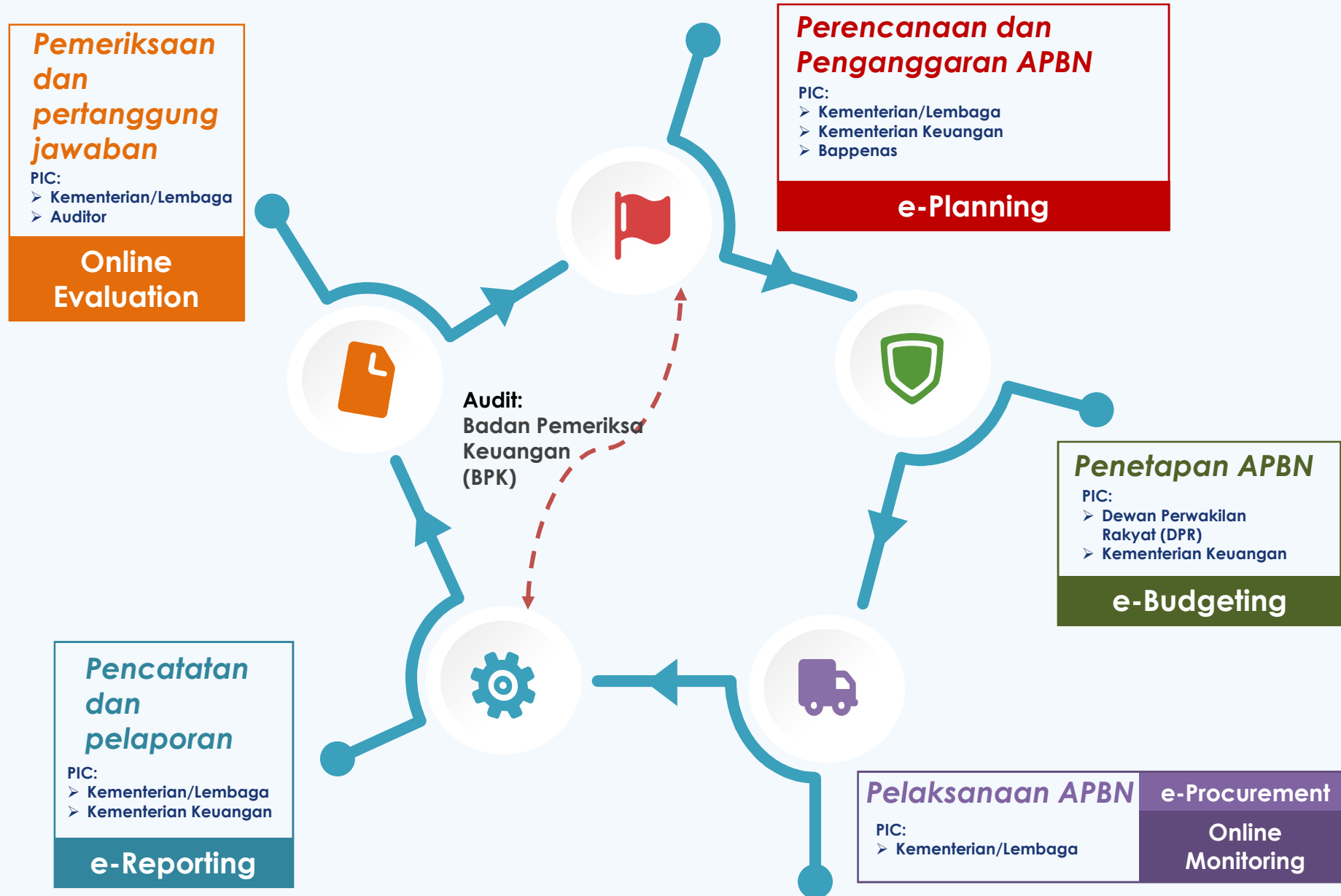
Business valuation:
US\$ 10 billion

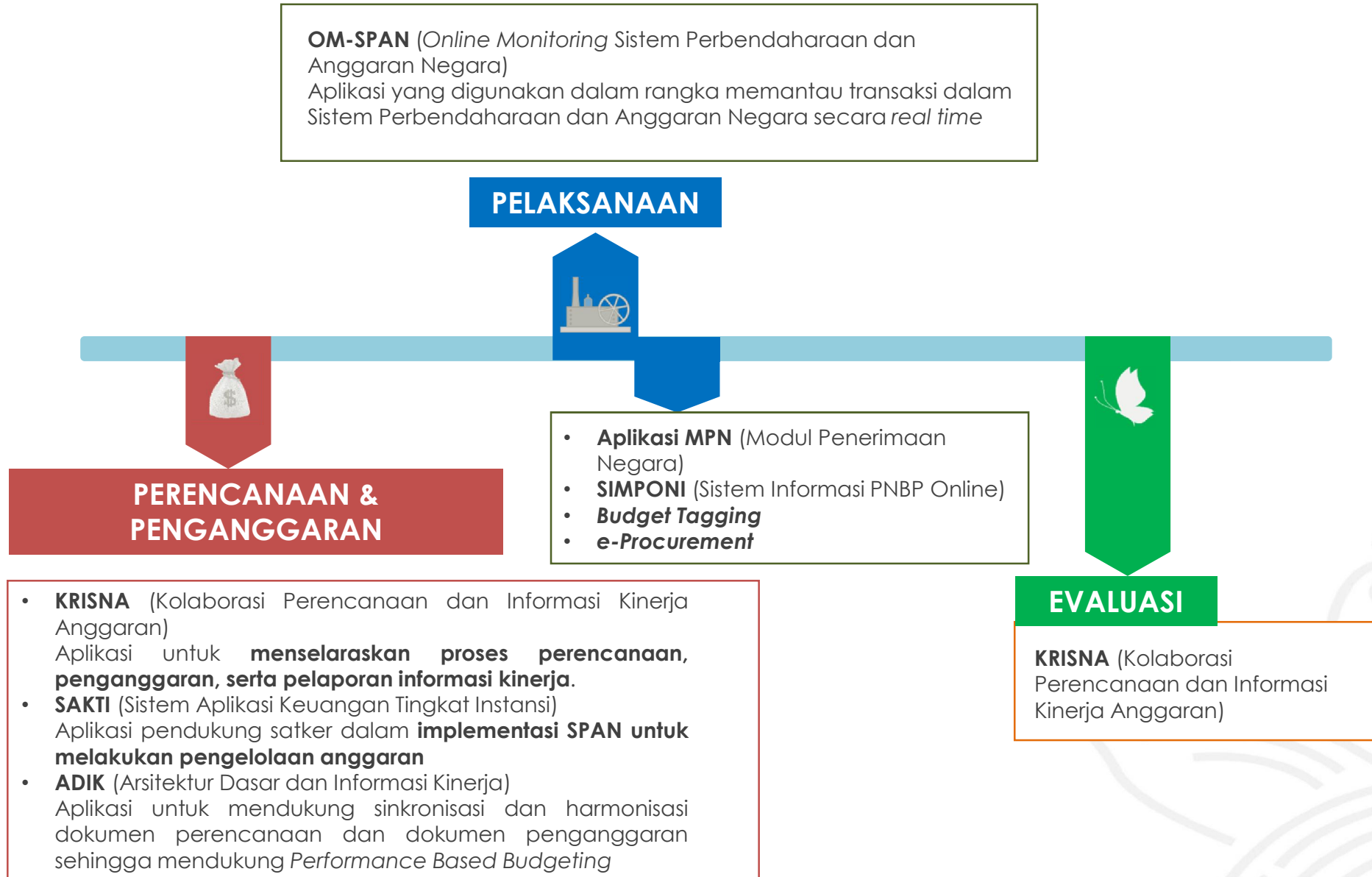
E-commerce value
US\$ 130 billion

**E-COMMERCE
INDONESIA TAHUN 2020**



PERAN IT DALAM SIKLUS PENGELOLAAN FISKAL (Efisien, Transparan, Akuntabel)







TATA LAKSANA INTERNAL

- e-Prime Kementerian Keuangan
- Nadine (naskah dinas digital)
- dan lainnya



PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

- e-faktur
- e-Filling
- dan lainnya



KOMUNIKASI PUBLIK

- Situs aktif
- Akun sosial media: facebook, twitter, Instagram, youtube
- BPPK TV
- dan lainnya

pengembangan e-government

- E-government akan **membuka akses** bagi sebuah warga negara untuk berkomunikasi dengan pemerintah, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan saranan diskusi antar warga negara tersebut.
- E-government juga akan **meningkatkan tingkat kepercayaan publik** terhadap kinerja pemerintah.
- Penerapan e-Government di Indonesia masih harus ditingkatkan
- Sinergi antar pemerintah dan iklim transparansi menjadi **fondasi** kesuksesan penerapan e-Government.
- Saat ini peringkat kualitas e-Government di Indonesia hanya menempati peringkat 116 dari 193 negara (sumber: UN e-Government survey 2016)
- Kementerian Keuangan telah menginisiasi berbagai metode digitalisasi tata laksana pemerintahan



RAPBN 2019

Sehat, Adil, & Mandiri

APBN Sehat

APBN Adil

APBN Mandiri



Defisit APBN diturunkan **dibawah 2% PDB**, pertama kali sejak tahun 2013



Keseimbangan Primer **mendekati Rp0** --> konsisten turun sejak 2015



Pajak Menjadi Insentif Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat & Ekonomi

Kenaikan PTKP 2013 : Rp24,3 juta
2016 : Rp54,0 juta

Penurunan tarif PPh UMKM menjadi 0,5%

Insentif Pajak bagi Dunia Usaha secara *targeted* (tax holiday/allowance)

Kriteria/syarat tertentu a.l :

Industri Pionir



Mempertimbangkan nilai investasi, orientasi ekspor, dan penyerapan tenaga kerja



Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi **83,1%** (2014: 74,0%)



Pembiayaan utang semakin **menurun**



Penguatan dan Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM

Anggaran Infrastruktur
2015 : Rp256,1 T
2019 : Rp420,5 T

Anggaran Pendidikan
2015 : Rp390,1 T
2019 : Rp487,9 T

Anggaran Kesehatan
2015 : Rp65,9 T
2019 : Rp122,0 T

Anggaran Perlindungan Sosial
2015 : Rp249,4 T
2019 : Rp381,0 T



Memperkokoh keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah

Transfer ke Daerah & Dana Desa:
2015 : Rp623,1 T
2019 : Rp832,3 T

hampir sama

Belanja K/L
2015 : Rp732,1 T
2019 : Rp840,3 T



THANK YOU

*Insanity is doing the same things over
and over again and expecting
different results*
(Albert Einstein)